

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG

Dalam bab III ini akan menjelaskan mengenai naik-turunnya hubungan bilateral AS-Jepang dalam bidang keamanan, mulai sejak AS meminta Jepang untuk menyerahkan diri sampai ke usaha AS dalam mencampuri politik luar negeri Jepang atau sebaliknya, Jepang yang harus terpaksa melibatkan diri kedalam politik luar negeri AS demi tercapainya apa yang diinginkan oleh Negara Adi Kuasa tersebut. Bab III ini juga akan memaparkan seberapa banyak usaha mereka dalam menciptakan kerjasama yang sudah berjalan 50 tahun lamanya, seperti perjanjian-perjanjian yang telah mereka jalankan.

A. Menyerahnya Jepang Terhadap Sekutu

Selama ini kita mengetahui bahwa Jepang tidak mempunyai militer yang mandiri. Keadaan Jepang yang seperti ini, berawal dari kekalahan Jepang dalam PD II yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian penyerahan diri Jepang kepada Sekutu, yang tertuang dalam *potsdam declaration* pada tanggal 26 Juli 1945 di Potsdam, yang dikeluarkan oleh Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat), Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris), dan Chiang Kai-Shek (Presiden, Panglima Tinggi Republik China). Akibatnya Jepang harus menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang pernah dibanggakan harus dilucuti pasukan Sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat . Amerika Serikat mengambil alih sistem pemerintahan Jepang dan harus tunduk di bawah sistemnya,

dan juga harus mengakui Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat, Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi kekuatan sekutu Pasifik, selaku officer pendudukan di Jepang.¹

Demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang, yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari. Konstitusi baru tersebut menetapkan tiga prinsip dasar yang salah satunya menegaskan tentang sikap negara Jepang yang cinta damai. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, pada artikel 9 Konstitusi 1947, secara tegas disebutkan tentang pelarangan penggunaan militer ke luar negeri berdasarkan keputusan sendiri.² Isi dari Artikel 9 Konstitusi 1947 tersebut adalah *"War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means of settling disputes with any other nation. No Army, Navy, Air Force, or otherwar potential will ever be authorized and no right of belligerency will ever be conferred upon the state."* Perang sebagai hak kedaulatan suatu negara dihapuskan. Ancaman atau penggunaan kekuasaan selamanya ditinggalkan sebagai alat penyelesaian konflik dengan bangsa lainnya. Tidak ada angkatan perang, angkatan laut, angkatan udara, atau potensi perang lain akan diberi hak dan untuk menyatakan keadaan perang dan mendapat persetujuan negara.³

¹ "Kerjasama Keamanan Jepang-Amerika Serikat dan Dinamika Kebangkitan Militer Jepang," artikel yang ditulis oleh Heri Alfian di Blogspot diakses 13 April 2010 di <http://alfianheri.blogspot.com/2010/01/japan-military-buildup.html>

² *Ibid*

³ "Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perdebatan Mengenai Artikel IX dan Implikasinya Terhadap AS di Masa Depan (2003-2005)," artikel yang ditulis oleh Mantri Karno di Wordpress diakses pada 7 Januari 2010 di <http://mantrikarno.wordpress.com/>

Pada 8 September 1951 terdapat adanya perjanjian San Fransisco (*San Fransisco Peace Treaty*) antara Sekutu dan Jepang yang ditandatangani oleh 49 negara, yang berlaku efektif pada 28 April 1952. Perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri Perang Dunia II dan mengakhiri secara resmi kependudukan Jepang sebagai Negara kekuatan imperialis serta mengalokasikan kompensasi untuk warga sipil Sekutu dan mantan tawanan Jepang yang menderita kejahatan perang Jepang.⁴ Perjanjian ini juga mewajibkan Jepang untuk mengorbankan semua wilayah yang didudukinya sejak 1895, serta memasukkan Jepang ke dalam sistem keamanan Amerika Serikat.⁵

B. Aliansi Keamanan AS-Jepang

Meskipun Jepang tak mempunyai militer, tetapi untuk menjaga keamanan wilayahnya, khususnya terhadap serangan dari luar, Jepang dipaksa mengadakan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Aliansi keamanan tersebut dituangkan dalam *The US-Japan Security Treaty* yang ditandatangani pada 8 September 1951 pada tahun yang sama dengan perjanjian San Fransisco, dan *Mutual Security Treaty* yang diperbaharui dan ditandatangani pada tahun 1960 di Washington. Berdasarkan perjanjian tersebut AS memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan untuk : (1) mempertahankan perdamaian dan perdamaian di Timur jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2)

⁴ "Perjanjian San Fransisco" diakses 13 Januari 2010 di http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_San_Fransisco

⁵ "Kerjasama Keamanan Jepang-Amerika Serikat dan Dinamika Kebangkitan Militer Jepang," artikel yang ditulis oleh Heri Alfian di Blogspot diakses 13 April 2010 di <http://alfianheri.blogspot.com/2010/01/japan-military-buildup.html>

Setelah berkonsultasi, AS dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan bersenjata pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain “harus melakukan konsultasi terlebih dulu dengan Pemerintah Jepang”.⁶ Sebuah perjanjian 2 negara yaitu seperti yang dilakukan AS-Jepang yang mengikrarkan dukungan militer, jika mereka diserang oleh negara lain, maka pakta keamanan bilateral yang telah mereka tandatangani dapat dijadikan alasan ataupun bukti tertulis sehingga dapat memberikan bantuan yang segera dan tanpa batas jika terjadi serangan terhadap salah satu negara tersebut, dan mereka wajib melakukan konsultasi sebelum melakukan tindak balasan, jika operasi dijalankan dari basis Jepang.⁷

Pada perjanjian tersebut, selain alasan keamanan Jepang, aliansi tersebut juga dilatarbelakangi oleh keinginan Sekutu untuk mempertahankan keberadaannya dikawasan Asia, khususnya di Asia Timur. Amerika Serikat berkepentingan untuk menjaga agar pengaruh komunis tidak meluas ke negara-negara Asia Pasifik khususnya di kawasan Asia Timur.⁸ Amerika Serikat menandatangani perjanjian berikutnya dengan Jepang pada tahun 1954 yang isinya adalah menyediakan perlengkapan-perengkapan, alat-alat, dan lainnya bagi Jepang. Sebaliknya Jepang menyediakan basis-basis militer dan alat-alat yang diperlukan oleh Amerika Serikat . Perjanjian tersebut adalah awal dimulainya babak baru negara Jepang yang tidak

⁶ Drs. Wawan Juanda, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A. Bardin. CV, 1999, hal 152

⁷ *Ibid*, hal 140

⁸ “*Kerjasama Keamanan Jepang-Amerika Serikat dan Dinamika Kebangkitan Militer Jepang*,” artikel yang ditulis oleh Heri Alfian di Blogspot diakses 13 April 2010 di <http://alfianheri.blogspot.com/2010/01/japan-military-buildup.html>

mempunyai militer, pertahanan dan keamanan sendiri. Sejak itulah, Jepang menggantungkan nasib keamanannya kepada AS dan mulai selalu terlibat dalam Politik Luar Negeri AS.⁹

Adanya ketentuan bahwa pasukannya sudah harus ditarik dari Jepang pada tahun 1952, menyebabkan Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memberikan jaminan keamanan kepada Jepang. Amerika Serikat tetap mempertahankan pasukannya di Jepang, karena dalam pandangan Amerika Serikat sangat berbahaya meninggalkan Jepang dalam keadaan tanpa militer. Sementara pada saat yang sama penyebaran komunisme sudah sampai ke Cina. Keputusan itu ditandai dengan penandatanganan *Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance*, pada tanggal 14 Februari 1950. Penegasan Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan militernya di Jepang terdapat dalam pidato Sekretaris Negara Dean Acheson di depan National Press Club pada 12 Januari 1950:¹⁰

Pada 1973, AS mengembalikan Okinawa kepada Jepang, dan pengembaliannya pun bukan tanpa syarat. Itu dibuat dengan pakta yang merugikan Jepang. Bunroku Yoshino, mantan direktur Biro Amerika Kementerian Luar Negeri, membeberkan isi pakta rahasia pengembalian Okinawa di depan pengadilan distrik Tokyo, bulan November tahun lalu (2009). Pakta tersebut mengizinkan AS membawa senjata nuklirnya ke Jepang, dan Jepang harus membayar US\$340 juta untuk

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

pengembalian Okinawa, pemindahan *Voice of America* dan relokasi pangkalan militer.¹¹

C. Revisi Aliansi AS-Jepang

Revisi mengenai Artikel 9 tersebut resmi disetujui oleh Pemerintah Amerika dan Jepang pada tahun 1997, pada bulan Mei 1999 Diet mengesahkan pemberlakuan revisi tersebut. Ada tiga undang-undang yang disahkan yaitu : (a) dukungan pada garis belakang, (b) dukungan logistik pada operasi militer AS pada situasi darurat di wilayah seputar Jepang, dan (c) pengiriman kapal dan helikopter SDF ke lautan di luar wilayah Jepang. Pada intinya revisi aliansi pertahanan ini adalah :

1. Kerjasama pada keadaan tidak ada perang/damai, meliputi tukar menukar informasi, konsultasi kebijakan dan kerjasama keamanan dalam berbagai jenis.
2. Kerjasama pada saat terjadi serangan langsung terhadap Jepang. Jepang bertanggung jawab penuh terhadap pertahanan teritorialnya, termasuk territory udara dan lautnya Amerika akan memberikan dukungannya.
3. Kerjasama pada situasi di daerah sekeliling Jepang, yang berarti merupakan komitmen Jepang untuk mendukung aktivitas militer AS pada situasi darurat di daerah di sekeliling Jepang. Dukungan tersebut meliputi operasi kemanusiaan penyelamatan (Search and Rescue/SAR), evakuasi non tempur dan dukungan Jepang terhadap kegiatan serta kerjasama operasional militer, yaitu: 1) Penggunaan fasilitas pelabuhan laut dan udara militer dan sipil Jepang untuk mendukung kapal-kapal serta pesawat-pesawat tempur AS. 2) Dukungan dari garis belakang terhadap Amerika

¹¹ Artikel yang ditulis oleh Arif Yudhanto di Aerospace diakses 7 Januari 2010 di <http://planet.aerospaceitb.org/>

yang sedang menjalankan operasi yang bertujuan untuk mencapai suatu objek yang ditetapkan dalam aliansi. Dukungan tersebut meliputi pasokan minyak, transportasi personel militer Amerika ke kapal-kapal perangnya, menjaga keamanan fasilitas-fasilitas AS, telekomunikasi sampai pada pengumpulan data-data intelijens, operasi menyapu ranjau dan menjamin keselamatan navigasi.¹²

D. Cooperation on Misille Defense

Ancaman postur yang ada pada Korea Utara saat ini jelas telah memberikan dorongan bagi kerjasama Jepang dengan Amerika dalam masalah *missile defense*. Sebaliknya, *missile defense* telah menjadi titik utama dari perubahan hubungan Amerika dengan Jepang sebagaimana perannya sebagai katalis bagi Jepang untuk mempertimbangkan keseluruhan strategi keamanannya. Diskusi-diskusi dengan Amerika mengenai kerjasama *missile defense* dimulai pada pertengahan tahun 1980-an, tetapi Jepang menolak berkomitmen sampai tes misil Korea Utara pada Agustus 1998. Setahun kemudian, pada Agustus 1999, para pejabat AS dan Jepang menyetujui diadakannya penelitian gabungan dalam sistem interseptor berdasarkan laut untuk penyebaran kapal-kapal yang dilengkapi dengan radar Aegis. Jepang telah memiliki empat penghancur Aegis, dan dua buah lagi sedang dalam perbaikan.¹³

Ancaman Korea Utara dan terorisme global telah menciptakan momentum publik yang lebih besar untuk mempertimbangkan pembangunan kerjasama *missile*

¹² "Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perdebatan Mengenai Artikel IX dan Implikasinya Terhadap AS di Masa Depan (2003-2005)," artikel yang ditulis oleh Mantri Karno di Wordpress diakses pada 7 Januari 2010 di <http://mantrikarno.wordpress.com/>

¹³ *Ibid*

defense antara Amerika dan Jepang. *White paper* yang dipublikasikan pada Agustus 2003 oleh *Japan Defense Agency* (JDA) menekankan kebutuhan untuk mengadakan tindakan-tindakan anti-misil untuk menghadapi Korea Utara dan ancaman teroris. Berdasarkan laporan ini, Japanese Diet telah menyetujui \$1 Milyar untuk *ballistic missile defense* (BMD) dalam budget tahunannya di tahun yang akan datang. Proposal sistem BMD akan terdiri dari misil SM-3 yang disembarkan dalam sistem anti misil penghancur *Aegis* dan *Patriot Advanced Capability* (PAC-3) berdasarkan darat.¹⁴

Banyak isu-isu sulit yang tetap tidak dapat terselesaikan, baik dari menangani isu-isu pengeluaran sampai legal, kebijakan, dan konstitusional. Batasan legal dan konstitusional menggambarkan hambatan untuk kerjasama penuh dalam *missile defense system* AS. Interpretasi ini juga menggambarkan hambatan bagi ketetapan Jepang untuk dukungan logistik bagi latihan gabungan, manuver-manuver, dan aktivitas kooperatif lainnya dengan Amerika, satu-satunya aliansi perjanjian Jepang. Sebagai contoh, di bawah hukum Jepang saat ini, SDF tidak dapat menangkap misil-misil kecuali perdana menteri memberi perintah untuk memobilisasi pertahanan. Bagimanapun, misil Nodong diperkenalkan dari Korea Utara hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai Jepang. Namun, Jepang perlu untuk mengatasi kondisi penguasaan mobilisasi pertahanan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Sebagai tambahan, SDF sendiri, termasuk kemampuannya untuk memobilisasi kekuatan, perlu untuk diatur kembali. Sejak pembentukannya pada tahun 1954, SDF telah eksis terutama sebagai organisasi dengan keterbatasan kapabilitas yang merupakan satu-satunya organisasi yang mengadakan latihan operasional. Pada tahun 1992, SDF mulai mengambil bagian dalam operasi *peacekeeping* PBB dalam berbagai peran di dunia. Sejak saat itu, SDF ditekankan untuk meningkatkan penelitian publik tentang bagaimana SDF menjalankan tugasnya. Tiga tagihan kontingen yang telah ditetapkan pada Juni 2003 meningkatkan kerangka kerja legal bagi SDF untuk melakukan aktivitas penting dalam waktu darurat sipil dan militer, tetapi SDF masih dibatasi kemampuannya untuk menyebarkan *missile defense system* yang efektif.¹⁶

Sebagai tantangan konstitusional, para pejabat Jepang untuk sekarang ini, menghindari penempatan masalah-masalah *collective defense* berkembang dari strategi *missile defense* AS dan telah memfokuskan perlindungan bagi pilihan Jepang untuk memperoleh kapabilitas BMD. Di bawah konstitusinya, Jepang dibolehkan untuk menangkap ikatan misil yang ditujukan bagi Jepang, hal ini akan mengkonstitusikan tindakan *self-defense*.¹⁷

Saat ini JDA telah menyatakan secara resmi bahwa penangkapan misil-misil yang terbang melintasi wilayah kepulauan tetapi tidak menargetkan Jepang tidak akan melanggar larangan konstitusi mengenai *collective defense*, meskipun hal ini telah

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

lama dipermasalahkan dalam konteks *joint U.S.-Japan missile defense system*. JDA juga telah menyatakan bahwa rencana pengenalan *missile defense system* tidak akan melibatkan Jepang dalam pertahanan negara-negara dunia ketiga. Dengan kata lain, konstitusi masih diinterpretasikan sebagai larangan bagi Jepang untuk menangkap misil-misil yang tidak melintasi negara, juga meskipun misil-misil ini menargetkan AS.¹⁸

Secara bertahap, pemerintah akan mengulang kembali interpretasi dari Artikel 9 bahwa Jepang tidak dapat mempraktekkan hak *collective self-defense*. Tujuan dari *missile defense system* tidak hanya terefleksi, tetapi juga membutuhkan pemikiran yang lebih luas dalam Jepang mengenai postur pertahanannya. Keamanan negara dan kebijakan pertahanan secara perlahan-lahan telah berubah dari larangan konstitusional terhadap penggunaan kekuatan menjadi profil keamanan yang lebih aktif.¹⁹

Berlanjutnya interpretasi ulang dari konstitusi mungkin tidak dapat disimpulkan dengan tindakan memiliterisasi Jepang, tetapi kesehatan, peningkatan partisipasi dalam aliansi pertahanan dengan AS. Tren ini tidak akan menjadi sumber kekhawatiran dalam kawasan karena ketegangan yang meningkat akibat penolakan Jepang untuk meminta maaf secara tulus dan resmi kepada negara-negara tetangganya karena kesalahan masa lalu.²⁰

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Akan tetapi banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam aliansi AS-Jepang seperti dalam kerjasama itu tidak menyebutkan secara spesifik batasan geografis dan ruang lingkup SDF, hanya disebutkan bahwa SDF wajib membantu Amerika dalam menjaga stabilitas kawasan di sekeliling Jepang, Selama ini kerjasama militer Jepang dengan AS selalu di dominasi oleh kepentingan pihak Amerika, Jepang mulai sadar bahwa kekuatan militer itu penting untuk mengatasi ancaman-ancaman yang datang dari luar terutama negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Karena dalam revisi AS-Jepang butir kedua mengatakan kerjasama pada saat terjadi serangan langsung terhadap Jepang. Jepang bertanggung jawab penuh terhadap teritori udara dan lautnya. AS akan memberi dukungan. Pada point inilah Jepang beranggapan bahwa AS tidak akan selalu membantu Jepang terutama terhadap masalah-masalah perbatasan. Di masa yang akan datang aliansi dengan AS tetap di pertahankan tetapi harus aliansi yang sejajar dan setara, karena selama ini aliansi terkesan terlihat memperlihatkan ketergantungan Jepang pada bidang pertahanan terhadap AS.²¹

E. Perjanjian Rahasia Antara AS-Jepang

Belum lama ini mencuat adanya issue perjanjian rahasia antara AS-Jepang mengenai nuklir. Pemerintahan baru Yukio Hatoyama membongkar keburukan pemerintahan Jepang masa lalu dengan adanya perjanjian antara kedua Negara tersebut, dan ini adalah sebagai bukti bahwa pemerintahan Hatoyama benar-benar memihak rakyatnya. Tim Kementerian Luar Negeri menyimpulkan, bahwa

²¹ *Ibid*

pemerintah Jepang dan Amerika Serikat pada masa perang dingin, telah membuat perjanjian rahasia terkait senjata nuklir dan isu lainnya. Meskipun perjanjian seperti itu, sudah dibuka oleh pemerintah AS, dan sumber lainnya, namun tim Kementerian Luar Negeri Jepang, yang baru dibentuk tahun 2009, setelah pergantian pemerintahan, menunjukkan bahwa pemerintah Jepang sebelumnya, telah bersikap tidak jujur terkait perjanjian rahasia, dan menimbulkan pertanyaan, terkait pengelolaan dokumen diplomatik pemerintah.²²

Tim Kemlu yang diketuai Profesor Kitaoka Shinichi dari Universitas Tokyo, telah memeriksa empat dokumen yang diduga sebagai perjanjian rahasia, termasuk perjanjian senjata nuklir, dan telah mendapatkan pembuktian bahwa tiga diantaranya adalah perjanjian rahasia. Diantara perjanjian rahasia yang diperiksa tim ialah perjanjian tanpa dokumen, yang disepakati pada saat revisi perjanjian keamanan Jepang-AS tahun 1960, yang membuat Pemerintah Jepang memperbolehkan kapal AS dengan senjata nuklir dapat melewati wilayah Jepang, tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu. Padahal dalam perjanjian sebelumnya, disebutkan bahwa Washington wajib berkonsultasi dengan Tokyo, sebelum mengirim senjata nuklir, yang memperlihatkan kuatnya sentimen anti senjata nuklir dikalangan masyarakat Jepang, setelah pemboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945.²³

²² "Tim Kemlu Jepang Pastikan Adanya Perjanjian Rahasia Jepang-AS" di akses 15 Mei 2010 di <http://www.nusantara-news.com/2010/03/tim-kemlu-jepang-pastikan-adanya-perjanjian-rahasia-jcpang-as.html>

²³ *Ibid*

Memo rahasia Departemen Luar Negeri AS pada 1960 untuk Christian Herter, yang kemudian menjadi menlu, mengatakan bahwa Washington telah berkonsultasi dengan Jepang mengenai “pengenalan persenjataan nuklir”. Namun memo itu mengatakan bahwa AS menempatkan tentaranya di Jepang sejak negara itu kalah dalam Perang Dunia II, bisa menggunakan wilayah Jepang bila diperlukan pada saat-saat darurat, jika Korea Utara tetangganya melancarkan serangan. Pada 1991, presiden AS George Bush mengumumkan bahwa kapal-kapal perang AS dalam waktu dekat akan mengangkut senjata-senjata atom taktis, dan membuat suatu perjanjian dengan Jepang untuk mengizinkan kapal-kapal bersenjata nuklir AS mengunjungi wilayah itu.²⁴

Sementara itu, dengan diungkapkannya perjanjian keamanan bilateral dari sisi Jepang, yang berisi 330 dokumen terkait, laporan Tim Kemlu menunjukkan bahwa prinsip Jepang sebagai negara non nuklir, yang tidak memiliki, memproduksi atau memperbolehkan senjata nuklir melewati wilayahnya, hanyalah sekedar topeng. Menurut Okada, memasukkan senjata nuklir ke Jepang tidak bisa dicegah, namun pengungkapan kasus ini tidak akan merubah kesepakatan keamanan Jepang-AS. Okada juga mengharapkan, laporan ini akan memberikan kontribusi dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap diplomasi, dan menjelaskan bahwa Jepang akan berpegang teguh pada tiga prinsip dasar non-nuklir, yang pertama kali

²⁴ “*Jepang Akui Perjanjian Rahasia Nuklir*” diakses 15 Mei 2010 di <http://www.antara.co.id/berita/1258874272/jepang-akui-perjanjian-rahasia-nuklir>

disampaikan mantan PM Sato Eisaku pada tahun 1967, yaitu: kebijakan tidak memiliki, memproduksi atau mengizinkan senjata nuklir di wilayah kedaulatannya.²⁵

F. Perdebatan Mengenai Artikel IX dan Implikasinya terhadap AS

Perdebatan mengenai issue keamanan yang mencuat adalah perdebatan mengenai Artikel IX yang terdapat dalam US-Japan Defen Treaty ini sebenarnya bukanlah issue yang tabu bagi masyarakat Jepang, terutama mengenai isi dari Artikel IX yang terdapat pada konstitusi Jepang yang dibuat oleh Mac Arthur. Isi dari Artikel 9 Konstitusi 1947 tersebut adalah *"War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means of settling disputes with anyother nation. No Army, Navy, Air Force, or otherwar potential will ever be authorized and noright of belligerency will ever be conferred upon the state."* Perang sebagai hak kedaulatan suatu negara dihapuskan. Ancaman atau penggunaan kekuasaan selamanya ditinggalkan sebagai alat penyelesaian konflik dengan bangsa lainnya. Tidak ada angkatan perang, angkatan laut, angkatan udara, atau potensi perang lain akan diberi hak dan untuk menyatakan keadaan perang dan mendapat persetujuan negara.²⁶

²⁵ "Tim Kemlu Jepang Pastikan Adanya Perjanjian Rahasia Jepang-AS" di akses 15 Mei 2010 di <http://www.nusantara-news.com/2010/03/tim-kemlu-jepang-pastikan-adanya-perjanjian-rahasia-jepang-as.html>

²⁶ "Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perdebatan Mengenai Artikel IX dan Implikasinya Terhadap AS di Masa Depan (2003-2005)," artikel yang ditulis oleh Mantri Karno di Wordpress diakses pada 7 Januari 2010 di <http://mantrikarno.wordpress.com/>

"Menurut data yang diperoleh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_9_Konstitusi_Jepang dan <http://mantrikarno.wordpress.com/>, sebenarnya perdebatan tersebut telah ada setelah adanya konstitusi tersebut, yaitu pada tahun 1947. Namun, perdebatan itu membeku ketika adanya Perang Dingin yang waktu itu menghadapi ancaman Uni Soviet. Jepang menganggap bahwa hanya AS lah yang mampu menandingi kemampuan Uni Soviet."

Sebagai pihak yang kalah, maka Jepang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam melakukan kesepakatan dengan Amerika, salah satunya dalam draf tersebut. Tetapi, banyak pihak Jepang yang keberatan atas draft konstitusi yang dibuat oleh Amerika tersebut. Yang berada dalam kelompok yang keberatan ternyata tidak hanya berasal dari pemerintah saja, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat Jepang. Salah satu yang berkeberatan mengenai draft konstitusi tersebut adalah Hitoshi Ashida, ketua Lower House Committee. Ashida menambahkan beberapa klausa dalam draft konstitusi yang setuju oleh MacArthur. Dengan perubahan ini membuat Jepang mempunyai hak untuk *self-defense*. Perubahan pada Artikel IX itu belum mengalami perubahan sampai sekarang, artikel IX pada konstitusi Jepang berisi: (1) *Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.* (2) *In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.*²⁷

Maksud dari perubahan Artikel tersebut adalah: (1) bercita-cita dengan sungguh-sungguh untuk suatu perdamaian internasional berdasar pada keadilan dan ketertiban dunia, Jepang selamanya meninggalkan peperangan sebagai hak kedaulatan bangsa dan penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai alat penyelesaian perselisihan internasional. 2) Dalam rangka memenuhi tujuan ayat yang

²⁷ *Ibid*

terdahulu, kekuatan angkatan darat, laut, dan udara, seperti halnya potensi peperangan lain, tidak pernah akan dipertahankan. Hak dalam keadaan berperang dalam sebuah negara tidak akan diperbolehkan.²⁸

Sementara itu ada 2 partai politik yang mempengaruhi perdebatan itu, yaitu Liberal Democratic Party dan Japan Socialist Party. Liberal Democratic Party (*LDP*), yang mewakili kalangan bisnis konservatif, agrikultur, dan kepentingan birokrat untuk mengawasi Draft itu dan mendominasi proses kebijakan. LDP berargumentasi bahwa yang terbaik untuk Jepang saat itu adalah memusatkan pada *economy recovery* dan mendukung dalam melakukan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat, dengan bersandar pada strategi deterrencenya Amerika (*nuclear umbrella*) yang terdapat dalam *U.S.-Japan Security Treaty*, dengan mendukung penempatan angkatan bersenjata Amerika di Jepang, dan merespon secara hati-hati permintaan Amerika supaya Jepang membangun kemampuan *self defense*.²⁹

Sedangkan partai yang kedua adalah partai Japan Socialist Party (*JSP*) yang mewakili kalangan buruh dan intelektual *left* dan tidak begitu setuju dengan aliansi Amerika Serikat-Jepang dan keberadaan pangkalan militer Amerika di Jepang karena hanya akan menyeret Jepang lebih dalam pada konflik dan membahayakan keamanan Jepang. JSP mendukung kenetralan tak bersenjata dengan memusat peran Jepang di

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdasarkan kepada perasaan cinta damai yang kuat di Jepang pasca perang.³⁰

Adanya Artikel IX itu juga memunculkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Jepang. Tidak semua menolak, tetapi sebagian besar pemikiran-pemikiran itu menyatakan keberatan atas Draft yang dibuat oleh Amerika tersebut. Ada 3 pemikiran yang mengalir di Jepang, yaitu Perspektif *Konvensional*, Perspektif *Nasionalist*, Perspektif *Pacifis*. Perspektif *konvensional*, yaitu dalam pemerintahan. Pemikiran-pemikirannya menggambarkan ciri khas dari Departemen Luar negeri, Agen Pertahanan dan ketakutan pertahanan diri Jepang, dan partai *Liberal Democratic Party* yang berkuasa, dan juga menggambarkan suara dari kelompok pemikir yang konservatif. Mereka menganjurkan tetap dipertahankannya hubungan aliansi keamanan Amerika-Jepang dan keberadaan pasukan Amerika di Jepang. Kelompok ini bersedia bagi Jepang untuk menanggung beban keuangan yang lebih besar lagi untuk mempertahankan keberadaan aliansi keamanan Amerika-Jepang. Namun mereka tidak menyetujui untuk memperluas kekuatan pertahanan Jepang dalam waktu dekat.³¹

Sedangkan Perspektif *nasionalist*, walaupun kelompok ini tidak bergabung dengan yayasan, institusi, atau dengan partai politik tertentu, mereka tersebar sebagai individu-individu yang berpengaruh di seluruh masyarakat Jepang. Kelompok nasionalis melihat era pasca Perang Dingin sebagai dunia tanpa kutub kekuatan

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

tertentu. Jepang dalam hal ini, harus siap untuk mempertahankan dirinya sendiri tanpa mengandalkan dirinya pada Amerika. Selama ini Jepang hanya mengikuti Amerika dalam kebijakan luar negerinya semenjak Perang Dunia II berakhir. Sudah saatnya bagi Jepang untuk menciptakan suatu kebijakan luar negeri dan keamanan yang berdiri sendiri, yang bebas dari dominasi Amerika. Jepang dapat menciptakan kebijakan yang demikian tanpa menghadapi kesulitan besar karena Jepang memiliki teknologi yang sama hebatnya dengan teknologi yang dipunyai oleh Amerika. Dengan orientasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang mandiri dari aliansi keamanan Amerika-Jepang atau bersikeras untuk mendapatkan suatu bentuk kemitraan sejajar. Jepang juga harus mempererat hubungan komunikasi dengan negara-negara di Asia lainnya.³²

Sementara itu perspektif *pacifist*, menganjurkan agar Jepang memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dalam konteks kepemimpinan kolektif PBB dengan jalan mengakhiri perjanjian keamanan dengan Amerika, mendukung PBB sebagai kekuatan nonmiliter global bagi perdamaian, mempertahankan konstitusi damai Jepang, dan mengurangi kapabilitas militer Jepang. Saluran komunikasi utama kelompok ini adalah para jurnalis liberal seperti *Sekai* dan surat kabar besar seperti *Asahi Shimbun* dan *Mainichi Shimbun*. Ada satu argumentasi yang menarik yang disampaikan oleh Motofumi Asai, bahwa Amerika tidak lagi memiliki kapabilitas militer untuk memainkan perannya sebagai stabilisator dunia karena Amerika secara

³² *ibid*

finansial tidak cukup kuat lagi. Hal ini menjadi menarik untuk diamati karena Jepang tidak lagi membutuhkan stabilisator maupun perjanjian keamanan.³³

Bagi kaum yang menolak adanya artikel IX itu dipicu adanya situasi yang tak sesuai dengan perkembangan jaman yang ada sekarang, khususnya disekitar Jepang, seperti Power China yang semakin meningkat dan ancaman yang berasal dari korea utara, tetapi juga adanya sentimen Anti-Jepang karena sejarah Jepang dengan Negara-negara jajahannya. Oleh karena itu, Jepang menuntut adanya kemitraan yang sejajar. Jepang menginginkan adanya self-defen karena tak mungkin jika sebuah Negara tidak mempunyai kekuatan dalam pertahanannya, dan ini juga dipicu adanya pemikiran bahwa Amerika tak selamanya mampu dan mau membantu Jepang dalam mempertahankan kepentingan Jepang, contohnya seperti yang terjadi pada konflik pulau senkaku (Jepang). Dari sinilah, Jepang mulai berpikir untuk membuat suatu pertahanan sendiri tanpa harus menggantungkan AS dalam masalah keamanannya, bahkan mungkin bisa saja Jepang tak lagi membutuhkan pangkalan AS yang ada di Okinawa khususnya.

G. Hubungan AS-Jepang Pasca Terjadinya Insiden Tahun 1995

Sejak Hubungan Aliansi AS-Jepang dalam keamanan, hubungan kedua Negara itu cukup baik. As mendirikan pangkalan militer di Jepang, khususnya yang ada di Okinawa demi menggerakkan misi dalam keamanan, terutama bagi Jepang yang telah dilucuti persenjataannya. Meskipun demikian, bukan berarti hubungan kedua Negara tersebut tanpa diwarnai adanya masalah. Selama 50 tahun, hubungan

³³ *Ibid*

kedua Negara tersebut mengalami pasang-surut, bahkan sempat memanas persis sebelum kedatangan Obama tahun 2009 lalu. Sebelum terjadi tuntutan besar-besaran dari masyarakat Okinawa, sebenarnya masalah ini sudah terlihat jauh-jauh hari, terutama sejak adanya insiden tahun 1995 yang ternyata menjadi pemicu utama warga Jepang, khususnya warga Okinawa secara besar-besaran menolak pangkalan itu tetap berdiri, sehingga hubungan Aliansi itu memanas. AS yang menginginkan pangkalan itu tetap berada di Okinawa, tetapi hampir seluruh warga Okinawa menolak adanya pangkalan itu tetap beroperasi di Okinawa demi mengurangi penderitaan warga Okinawa selama pangkalan itu berdiri di wilayah tersebut.

Tuntutan demi tuntutan untuk menutup pangkalan itu pun semakin bermunculan, terutama pada pemerintahan baru Yukio Hatoyama yang mengakhiri pemerintahan konservatif Jepang yang selalu menuruti keinginan AS selama ini. Tuntutan-tuntutan tersebut tidak hanya berasal dari warga Okinawa saja, tetapi juga dari pemerintah yang ada dalam pemerintahan baru Yukio Hatoyama. Mereka menuntut sepenuhnya atas pengembalian tanah Okinawa setelah selama 50 tahun hamper sebagian besar tanah mereka diduduki AS. Hal ini bukan berarti Jepang tidak pernah bertindak sesuatu karena sebenarnya proses pengembalian Okinawa sudah berlangsung sejak lama hanya saja belun satu pun yang terealisasi. Perjanjian demi perjanjian pun dibuat agar situasi ini menjadi lebih baik dan menemukan solusi terbaik agar tidak merusak kerjasama yang telah ada sejak 50 tahun silam.

Pada tahun 2006 ditandatangani sebuah perjanjian AS dan Jepang pada 2 Desember 1996. Perjanjian ini mewajibkan AS mengembalikan 21% dari total

wilayah militernya di Okinawa kepada Jepang. Pada tahun 2009 dilaksanakan sebuah pertemuan yang membahas pengembalian wilayah yang selama 1 dekade belum terealisasi, tetapi hasilnya nihil. Kemudian pada tahun 2009, tepatnya 17 Februari 2009, AS (Hillary Clinton) dan Jepang (Nakasone Hirofumi) menandatangani Traktat Guam (*Guam Treaty*) yang diantaranya berisi: (1) Pemindahan 8000 personel marinir AS beserta 9000 anggota keluarganya ke Guam, di perairan pasifik. (2) Pemindahan stasiun udara Futenma di Ginowan ke Nago, tepatnya di Camp Schwab. Proses pemindahan ini akan dilakukan hingga 2014.³⁴

Pada tahun 1973, sebenarnya terdapat pakta rahasia antara AS-Jepang mengenai pengembalian Okinawa kepada Jepang. Itu dibuat berdasarkan pakta yang merugikan Jepang. Jepang harus membayar US\$ 340 juta untuk pengembalian Okinawa, pemindahan Voice of America dan relokasi pangkalan militer. Hal ini dibebankan oleh mantan Direktur Biro Amerika Kementerian Luar Negeri di depan pengadilan distrik Tokyo bulan November 2008.³⁵

Sekian banyak perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, tetap saja Okinawa masih menjadi wilayah yang masing-masing negara mempertahankan kepentingannya. Jepang ingin Okinawa kembali ke tangan Jepang, sedangkan AS menginginkan Jepang untuk menghormati perjanjian sebelumnya yang masih mengizinkan AS untuk mempertahankan pangkalannya di Okinawa. Banyak yang tidak menyetujui adanya perjanjian tahun 2009 itu karena Nago masih termasuk

³⁴ Artikel yang ditulis oleh Arif Yudhanto di Aerospace diakses 7 Januari 2010 di <http://planet.aerospaceitb.org/>

³⁵ *Ibid*

wilayah Okinawa, sedangkan masyarakat Okinawa menginginkan itu keluar dari Okinawa bahkan keluar Jepang. Tuntutan warga ternyata didukung oleh pemerintahan baru Jepang sekarang. Mereka menginginkan pangkalan itu dipindahkan sepenuhnya ke Guam.

AS tak tinggal diam mengetahui permasalahan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton melobi Pangkalan Okinawa dengan bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Jepang Katsuya Okada di Washington. Perundingan itu dilakukan menjelang kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Jepang.³⁶ Hillary Clinton juga menyampaikan pesan kepada Katsuya Okada ketika Hillary mulai kunjungan ke empat di Asia sejak dia menjadi Menlu. Mereka menganggap bahwa masa depan Futenma adalah penting bagi masa depan dan banyak aspek yang diperlukan untuk memeliharanya, sehingga sayang apabila harus ditutup atau bahkan keluar dari Jepang.³⁷

Sementara Robert Gates selaku Menteri Pertahanan AS juga mempertegas bahwa tak ada pengganti nota kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya mengenai pangkalan militer tersebut. Sementara diketahui banyak perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak. AS meminta Jepang menghormati apa yang telah disepakati karena itu semua adalah strategi AS dalam melaksanakan tugasnya untuk menstabilkan keamanan, khususnya di Asia Timur mengingat ancaman China dan Korea Utara semakin memanas. Ini merupakan ancaman potensial bagi AS yang bisa

³⁶ <http://www.wartakota.co.id/read/warta/15570> diakses 12 Januari 2010

³⁷ <http://www.sinarharapan.co.id/brita/read/as-imbau-jepang-bantu-akhiri-sengketa-pangkalan/> diakses 11 Januari 2010

menghancurkan apa yang ada dibenak AS dan apa yang telah dirancang oleh AS untuk menjalankan kepentingannya itu. Oleh karena itu, AS tetap menginginkan pangkalan itu tetap beroperasi di Okinawa dan menjalankan perjanjian yang telah mulai dibahas pada tahun 2006 dan membangun pangkalan militer Modern di Camp Schwab (Nago) yang ada di tepi pantai Okinawa yang dirasa lebih strategis dalam menjalankan aktifitas militernya, selain di Futenma (Ginowan).